

Judul : Amnesti bisa Dijalankan tanpa Undang-Undang
Tanggal : Kamis, 25 Februari 2016
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 5

Amnesti Bisa Dijalankan tanpa Undang-undang

JAKARTA — Praktek pengampunan pajak di Indonesia tak selalu dijalankan dengan undang-undang. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menjalankannya dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang pengampunan pajak.

Yustinus menyampaikan hal ini untuk menanggapi tertundanya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak di Dewan Perwakilan Rakyat. Secara teknis dan yuridis, ia menjelaskan, kebijakan setingkat keputusan presiden sangat mungkin digunakan sebagai landasan *tax amnesty*.

Masalahnya, dasar hukum tersebut bisa saja kalah kuat oleh aturan yang lebih tinggi, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. "Nanti bisa kalah kalau diuji materi," ucap Yustinus kemarin. Risiko lainnya, data yang dihimpun dalam proses pengampunan itu bisa saja kemudian digunakan untuk proses hukum pidana lain. Jika itu terjadi, tak akan ada yang mau mengikuti tawaran amnesti tersebut.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 26 yang diten- ken Soeharto, Yustinus

menuturkan, semua jenis pajak, termasuk pajak kekayaan, dapat diberi pengampunan. Nilai tebusannya sebesar 1 persen dari jumlah kekayaan. Di sana, diatur pula bahwa wajib pajak yang telah diberi pengampunan akan dibebaskan dari pengusutan pajak. Laporan kekayaan yang disampaikan dalam rangka pengampunan pajak pun tidak dapat dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apa pun.

Berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah tak mengantisipasi tertundanya pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR. Karena itu, aturan alternatif sebagai payung hukum pengganti juga tak disiapkan.

Menurut Pramono, Presiden meminta Dewan segera membahas RUU ini karena sangat mendesak di tengah kemungkinan besarnya defisit anggaran. Jika hal itu bisa dijalankan, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang direncanakan bisa terlaksana. "Jadi ada ruang untuk pembangunan yang diharapkan Presiden Joko Widodo."

● ADITYA BUDIMAN | TRI ARTINING PUTRI